

SKRIPSI

**PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN
PEMERINTAH SINGAPURA DALAM UPAYA PENINDAKAN KONKRIT TERHADAP
PEMBERANTASAN PARA KORUPTOR YANG MELAKUKAN PELARIAN KE
SINGAPURA**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2017

Nomor Reg : 4753/PK VII/II/2017

**PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN
PEMERINTAH SINGAPURA DALAM UPAYA PENINDAKAN KONKRIT TERHADAP
PEMBERANTASAN PARA KORUPTOR YANG MELAKUKAN PELARIAN KE
SINGAPURA**

(Rachmat Hidayat, 1310111015, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2017, 124Halaman)

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi tidak lagi merupakan masalah nasional, melainkan sudah menjadi fenomena kejahatan transnasional. Berdasarkan hal tersebut kerjasama internasional menjadi hal yang esensial dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dan pemberantasan pelarian koruptor ke Singapura yang menjadi surga bagi para koruptor. perjanjian ekstradisi merupakan pranata hukum yang dianggap ideal dalam mengatasi kejahatan yang tergolong kejahatan transnasional. Untuk itu Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani perjanjian ekstradisi sekaligus perjanjian kerjasama pertahanan (*Defense Cooperation Agreement*) dengan Singapura namun belum bisa diterapkan Karena belum diratifikasi oleh DPR. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian Normatif-Empiris yang merupakan penggabungan antara penelitian hukum normatif dengan adanya penambahan unsur empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan tertulis yang bersifat data sekunder Penelitian hukum empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berfikir dengan kebenaran secara koresponden. Hasil penelitian menemukan bahwa Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura memiliki peranan yang penting dalam membantu penegakan hukum nasional Indonesia khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi, pemberantasan pelarian koruptor ke Singapura dan pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi. Dengan adanya ekstradisi memberikan manfaat bagi negara melalui penegak hukumnya yang berwewenang dalam membantu proses pencarian dan penangkapan pelaku kejahatan yang mlarikan diri diluar yurisdiksi negara Indonesia. Selain itu adanya landasan yang menjamin untuk bekerja sama yang terbuka dan wajib dilaksanakan sesuai permintaan dari para pihak yang menandatangani perjanjian tersebut.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Perjanjian Ekstradisi, Ektradisi.

EXTRADITION TREATY BETWEEN THE GOVERNMENT OF INDONESIA AND SINGAPORE IN ATTEMPT TO DO LEGAL ACTION ON CORRUPTORS ERADICATION ESCAPING TO SINGAPORE

(Rachmat Hidayat, 1310111015, Faculty of Law, University of Andalas, 2017, 124 Pages)

ABSTRACT

Corruption is no longer a national issue but a transnational crime phenomenon. Due to the phenomenon mentioned above, international cooperation is necessarily required to do the prevention and eradication of corruption and the corruptors escaping to Singapore, where it is considered as the safest place for the corrupt. Extradition treaty is a legal order which is considered ideal in solving crimes classified as transnational crimes. Therefore, the government of Indonesia has already been agreed to the extradition treaty as well as Defense Cooperation Agreement with Singapore but it is yet implemented for it has not been ratified yet by the parliament. The present study is conducted by normative-empirical method which is constituted as the integration of normative legal research by adding empirical element. Normative legal research is research conducted or addressed to the written policies plays as secondary data. Meanwhile, empirical legal research is a research method conducted to obtain primary data and discovering the truth by thinking method. The result of the study indicates that extradition treaty between Indonesia and Singapore plays pivotal role in Indonesia law enforcement especially in corruption eradication, stop the escaping corruptors to Singapore and return on assets to corruption. The presence of extradition treaty is beneficial for the country through its law enforcers whose authorize in assisting the search and arrest process of the criminals escaping to abroad. Besides, the foundation guaranteeing to open cooperation and must be implemented at the request of the parties signing the agreement.

Key words: Corruption cases, Extradition treaty, Defense Cooperation Agreement, Corruption eradication.